



PEMERINTAH KABUPATEN

GUNUNG MAS

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna dan berdaya guna, bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan publik. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dengan mengacu kepada perencanaan Strategis 2019-2024 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Kuala Kurun, 15 Juli 2022
INSPEKTUR,



Drs. DIHEL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690820 199403 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
A. Tujuan dan Sasaran	10
B. Program dan Kegiatan	10
BABIV : PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Inspektorat pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja seluruh Aparatur Pemerintah Daerah melalui kerja sama secara terkoordinasi

guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Saat ini reformasi birokrasi telah berlangsung, yang mencakup antara lain upaya pemberantasan KKN, penerapan otonomi daerah, desentralisasi dan netralitas Pegawai Negeri Sipil. Walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, masih terdapat permasalahan di bidang pengawasan yang tidak saja harus dihadapi, tapi juga diselesaikan, yaitu:

1. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan pemerintah daerah belum efisien, efektif dan berperilaku hemat;
2. Praktek KKN belum sepenuhnya teratasi;
3. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah yang diembannya;
4. Pelayanan publik masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat;
5. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja.

Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan SDM Aparatur, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik serta membangun kultur birokrasi baru.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dari pembuatan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/220/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tanggal 11 Agustus 2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

D. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kinerja ini mengkomunikasikan pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023 dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 juga memasukan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS). Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Inspektorat agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, diantaranya bab ini

menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan juga Sistematika Penulisan.

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu, menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun lalu dan Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, serta Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut untuk mengatasinya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Metode pengukuran kinerja program yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator input, output maupun outcome dari seluruh kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) dilakukan analisis penyebab terjadinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja yang akan mendatang.

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019 (tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2021 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
4. 02. 4. 02. 01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran					
4. 02. 4. 02. 01. 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya surat yang terkirim	500 lembar	500 lembar	500 lembar	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran aktivitas kantor	12 bulan 3 Jenis	12 bulan	12 bulan	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaksanaan tugas berjalan lancar	100%	30 unit	30 unit	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 jenis	30 jenis	30 jenis	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia blanko dinas, kop surat dinas, nota dinas dan dokumen	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	9 jenis	9 jenis	9 jenis	-	-

4.	02.	4.	02.	01.	01.	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai Inspektorat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	01.	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Pelaksanaan tugas berjalan lancar	5800 liter	5800 liter	5800 liter	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	01.	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat pegawai dan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	01.	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pengawasan yang terkoordinir dan peningkatan mutu hasil pengawasan	16 kali	16 kali	16 kali	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	01.	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung perkantoran	11 orang	12 orang	12 orang	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	01.	20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Pengawasan yang terkoordinir dan peningkatan mutu hasil pengawasan	102 kali	33 kali	33 kali	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi					
4.	02.	4.	02.	01.	02.	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	02.	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	10 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	02.	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan Inspektur	-	100%	100%	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	02.	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Inspektorat terpelihara dengan baik	1 Unit	4 jenis	1 Unit	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	02.	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil dinas jabatan Inspektorat kab. Gunung mas terpelihara dengan baik	2 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-

4. 02. 4. 02. 01. 02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional terpelihara dengan baik	18 Unit	14 Unit	14 Unit	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercukupinya kelengkapan pakaian dinas sesuai peraturan yang berlaku					
4. 02. 4. 02. 01. 03. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas yang memadai	94 Stell	47 stel	49 stel	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 03. 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik yang memadai	151 Stell	47 stel	5 stel	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Pengawasan					
4. 02. 4. 02. 01. 05. 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional	-	-	18 orang	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 05. 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya kursus/ pelatihan/ bimtek/ sosialisasi	48 kali	20 orang	20 orang	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 05. 05	Magang studi banding/ kursus singkat nonformal *)	Terlaksananya Kegiatan Studi Banding	-	-	15 orang	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu					
4. 02. 4. 02. 01. 06. 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan Inspektorat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 06. 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Inspektorat Kabupaten Gunung Mas	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 06. 05	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan TEPPRA Inspektorat	3 orang	3 orang	3 orang	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 06. 11	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-

4. 02. 4. 02. 01. 06. 25	Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa *)	Realisasi Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	4 kali		
4. 02. 4. 02. 01. 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya sinkronisasi penatausahaan persediaan Inspektorat					
4. 02. 4. 02. 01. 17. 19	Sosialisasi Pertanggungjawaban Dana Desa	Tertibnya Administrasi Keuangan Desa	-	114 desa	114 desa	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 20.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya Pengawasan Internal sesuai PKPT					
4. 02. 4. 02. 01. 20. 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Pelaksanaan pemerintahan yang efektif efisien dan ekonomis serta bersih	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
4. 02. 4. 02. 01. 20. 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terselesaikannya kasus-kasus pengaduan masyarakat	90 Kasus	24 kasus	24 kasus	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 20. 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Peningkatan jumlah penyelesaian tindak lanjut atas temuan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 20. 09	Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kab. Gunung mas	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 20. 11	Pengembangan, operasi dan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-IP)	Terselenggaranya Sstem Informasi Tindak Lajut Hasil Pengawasan Inspektorat	-	100%	100%	-	-
4. 02. 4. 02. 01. 20. 12	Reviu RKA-SKPD	Terlaksananya reviu RKA SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten gunung mas	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-

4.	02.	4.	02.	01.	20.	13	Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Tercapainya dan terwujudnya pemahaman tentang Sapu Bersih Pungutan Liar	-	2 kegiatan	1 Tahun	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	14	Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Tercapainya dan terwujudnya pemahaman tentang Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	-	2 kegiatan	1 tahun	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	15	Pengawasan Dana Desa	Tertibnya pelaporan penggunaan Dana Desa	-	114 desa	114 desa	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	16	Penyelenggaraan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Pelaporan Rencana Aksi tepat waktu	-	4 kali	4 kali	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	17	Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Terwujudnya Pemahaman tentang Gratifikasi	-	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	19	Audit Kinerja *)	Audit Kinerja SOPD berbasis Resiko	-	-	1 kali	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	20.	20	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan *)	Terlaksananya Penyusunan PKPT berbasis resiko	-	-	1 Laporan		
4.	02.	4.	02.	01.	20.	21	Survei Penilaian Integritas (SPI) *)	Penilaian Integritas	-	-	1 kegiatan		
4.	02.	4.	02.	01.	30.		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tercapainya Laporan PMPRB tepat waktu					
4.	02.	4.	02.	01.	30.	39	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Tersusunnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	3 paket	9 kali	9 kali	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	30.	40	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP	-	100%	100%	-	-
4.	02.	4.	02.	01.	30.	41	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Peningkatan SDM ASN melalui transfer <i>knowledge</i>	-	-	6 kali	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan- penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN'

2. Sasaran Strategis :

- a. Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di SOPD
- b. Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh OPD
- c. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD
- d. Meningkatnya kapabilitas APIP

3. Indikator Kinerja Utama :

- a. Terkirimnya laporan PMPRB tepat waktu
- b. % OPD yang memiliki nilai Sakip B mencapai 40%
- c. Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- d. Level Kapabilitas mencapai level 3

B. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tersebut maka perlu dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program program yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 3 program yang terdiri dari 31 kegiatan .

Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Gunung Mas

PROGRAM		KEGIATAN	
1		2	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11	Penyediaan Bahan/Material
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		3	Reviu Laporan Kinerja
		4	Reviu Laporan Keuangan
		5	Pengawasan Desa
		6	Kerjasama Pengawasan Internal
		7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunung Mas serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Tahun 2023.

Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH													2,613,613,440
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1,555,350,940
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													0	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								37,011,984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													74,000,000	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								4,577,515,390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Laporan		444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74,000,000		
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													371,270,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	60 Paket		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terlaksannya Sumber daya manusia pada APIP			0 Orang 100 persen		167,334,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			268,770,000		
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		meningkatnya SDM pada APIP			100 persen		205,794,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102,500,000		
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													502,807,720	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							196,498,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,600,000		
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							60,263,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,500,000		
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							43,873,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,000,000		
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							11,902,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,902,500		
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material							33,407,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			33,407,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										(PAD)				
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								326,323,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				341,398,220
6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									42,794,400					0
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya Bangunan Kantor				1 Unit		42,794,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									384,990,430					384,990,430
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,400,000
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								45,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				45,420,000
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								337,170,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				337,170,430
6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									231,348,665					222,282,790
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								79,063,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				79,063,920
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								93,218,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				93,218,870
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi persentase pemeliharaan aset gedung kantor		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun		1 Unit 100 persen		59,065,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									1,732,941,930					898,262,500
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal									1,514,068,120					398,262,500
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								246,762,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				246,762,500
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		28 Laporan		123,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja								119,999,620					0
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan		persentase objek pemeriksaan yang		Kab. Gunung Mas, Kurun,		100 persen		800,000	Dana Transfer Umum-Dana				60,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.06.00 INSPEKTORAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			dilakukan pengawasan		Kuala Kurun					Alokasi Umum			
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa								799,487,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			21,000,000
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal		persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun		100 persen		28,752,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			60,000,000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								194,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
6 01 02 2.02	Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								218,873,810				500,000,000
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								67,613,810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		persentase objek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		151,260,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			500,000,000
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								184,702,670				160,000,000
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								444,000				80,000,000
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		persentase OPD yang menjadi objek dalam penyusunan PKPT		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun		100 persen		444,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			80,000,000
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								184,258,670				80,000,000
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Rasio jabatan yang terpenuhi		Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun		100 persen		444,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum			80,000,000
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								183,814,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
TOTAL									8,317,146,489				2,613,613,440

Kuala Kurun, 15 Juli 2022
INSPEKTUR



Drs. Dihel, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19690820 199403 1 019